

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam merancang strategi yang tepat bagi perusahaan, manajer biasanya akan mencari cara yang paling sistematis dan efisien untuk mengantisipasi dan mengelola setiap peluang di lingkungan bisnisnya. Manajer akan memaksimalkan setiap cara yang digunakan untuk memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik dimata investor. Kinerja perusahaan merupakan cerminan kerja perusahaan. Untuk memperoleh prestasi kerja perusahaan yang baik, dalam hal ini manajer akan membangun hubungan dengan pihak lain untuk mendukung setiap strategi yang sudah dirancang. Salah satunya adalah membangun *political connection* (hubungan politik).

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu keberhasilan sebuah perusahaan tidak terlepas dari adanya pengaruh lingkungan politik. Salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan adalah politik (Wulandari, 2012). Bisnis dan politik adalah dua kegiatan yang saling berkaitan. Tujuan dari politik adalah untuk merumuskan kebijakan publik termasuk untuk kepentingan dalam dunia bisnis. Bisnis dapat menunjang politik, demikian juga sebaliknya. Maka dapat dikatakan bahwa bisnis dan politik merupakan dua hal yang saling berkaitan.

Aktivitas bisnis dapat dipermudah karena adanya kegiatan politik. Sebaliknya, politik dapat dipermudah karena adanya kegiatan bisnis. Tanpa adanya kegiatan bisnis, politik tidak akan mungkin dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, kegiatan bisnis juga berjalan baik jika kondisi politik kondusif dan mendukung. Dari hubungan antara bisnis dan politik seperti yang telah dijelaskan di atas muncul istilah *political connection*.

Perusahaan yang mempunyai *political connection* diartikan sebagai perusahaan besar atau perusahaan milik konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Suatu perusahaan yang terkoneksi politik mendapatkan beberapa manfaat antara lain kemudahan akses untuk memperoleh pinjaman dari bank serta kemudahan untuk mendapatkan kontrak atau memenangkan tender proyek-proyek besar dari pemerintah.

Sebagai contoh di Indonesia, salah satu perusahaan propertiterbesar di Jakarta yaitu Lippo Group yang menjalin hubungan baik dengan presiden sekarang ini Joko Widodo, dimana perusahaan keluarga konglomerat Riady ini merupakan salah satu perusahaan besar yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi-JK pada Pilpres tahun 2014 lalu (detik.com, 2016). Setelah kemenangan Jokowi-JK, saham milik Lippo Group di pasar modal meningkat tajam. Sebagian perusahaan Lippo Group, mencatat keuntungan yang berlipat ganda pada tahun 2014. Harga saham Multipolar (MLPL) melonjak 105,56% ke Rp 740 per saham. Kemudian harga saham Lippo Cikarang (LPCK) tumbuh 76,41% menjadi 8.600 rupiah per lembar saham.

Disisi lain, hasil yang berbanding terbalik didapatkan oleh, Grup MNC dan Grup Bakrie. Ini disinyalir disebabkan karena pengendali Grup Bakrie Aburizal Bakrie dan pemilik Grup MNC Hary Tanoesoedibjo adalah pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Beberapa saham Grup Bakrie babak belur. Harga saham Bumi Resources (BUMI) anjlok 48% (ytd). Bahkan harga saham Bakrieland Development (ELTY), Bakrie Telecom (BTEL) dan Bakrie Sumatra Plantations (UNSP) berada di harga Rp 50 per saham. Harga emiten Grup MNC juga merosot sejak awal bulan ini (Juli 2016). Contohnya harga saham Media Nusantara Citra (MNCN) turun 6% menjadi Rp 2.605 per saham.

Tidak hanya harga saham yang melonjak setelah terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh Lippo Group saat itu, Lippo Group kembali mendapat hasil yang menguntungkan dari hubungannya dengan pasangan presiden dan wakil presiden saat ini. Pada tanggal 24 Agustus 2016 lalu Presiden Joko Widodomengeluarkan kebijakan baru yaitu Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 13 yang disinyalir lebih menguntungkan para pengembang bisnis properti. Kebijakan ini menitikberatkan perhatiannya pada percepatan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi apabila dilihat dari bidang ekonomi justru kebijakan ini lebih cenderung menguntungkan para pengusaha properti besar ketimbang masyarakat kelas menengah ke bawah.

Pada paket kebijakan ekonomi jilid 13 ini berisi tentang penyederhanaan regulasi yang menghapus 22 tahapan perizinan yang dulunya para pengembang harus melewati 33 tahapan menjadi hanya perlu melewati 11 tahapan saja. Jenis

perizinan yang dihilangkan antara lain menyangkut izin lokasi, persetujuan gambar *master plan*, persetujuan dan pengesahan gambar *site plan*, izin *cut and fill* dan analisis dampak lingkungan lalu lintas. Dengan adanya pemangkasan proses dan biaya perizinan ini, biaya pembangunan rumah akan semakin murah dan permintaan akan semakin meningkat.

Hal ini tentu membuat para pengembang bisnis properti leluasa mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Tak hanya itu, sejak tanggal 9 Agustus 2016 lalu, para pengusaha besar telah banyak menerima angin segar lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu BI Seven days repo dan permohonan kredit rumah bersubsidi melalui e-FLPP.

BI *Seven days repo* merupakan kondisi di mana acuan bunga ini lebih rendah dari BI *rate*. Acuan bunga yang ditetapkan pada BI *rate* sebesar 6.50%, dianggap lebih besar daripada BI *Seven days repo* yakni 5.25%. Berarti bunga pada bank lain juga berkesempatan untuk turun, maka tingkat suku bunga KPR yang semakin murah akan mendorong minat banyak orang untuk membeli rumah dengan pembiayaan kredit, apalagi properti termasuk dalam kebutuhan dasar manusia.

Permohonan kredit rumah bersubsidi yang proses sebelumnya memakan waktu 7 hari, kini hanya 3 hari dengan menggunakan e-FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Bank Indonesia juga telah menyempurnakan ketentuan *loan to value* atau *financing to value* untuk kredit pemilikan properti dan kredit konsumsi beragam properti. Sehingga uang muka atau *down payment* (DP) yang

dikenakan kepada masyarakat yang ingin membeli hunian lewat KPR lebih rendah dari sebelumnya.

Dari kebijakan tersebut maka secara tidak langsung akan membuat banyak orang berkeinginan membeli rumah karena sudah didukung dengan kemudahan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga banyak perusahaan properti akan dibanjiri banyak permintaan. Tentu saja hal ini akan membuat pendapatan perusahaan itu juga meningkat dan membuat investormenjadi tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan properti melihat peluangnya yang cukup menggiurkan dalam jangka panjang.

Hubungan antara pengusaha dengan partai politik sebenarnya bukan hal yang baru dan bahkan sudah ada UU yang mengatur kebijakan antara hubungan parpol dengan badan swasta di Indonesia. Dana yang dimiliki partai politik tidak cukup hanya dari iuran anggota partainya, tetapi juga turut melibatkan perjanjian transaksional. Bentuk timbal balik terhadap pemberi dana dapat berupa lobi politik, tender proyek, atau kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan atau individu terkait. Di Indonesia, pihak-pihak yang berkaitan dengan kebijakan sebagian besar berasal dari partai politik, baik itu pejabat pemerintah (presiden dan para menteri) sebagai pihak yang mengajukan kebijakan (dalam bentuk rancangan undang-undang), maupun para anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pihak yang mengesahkan usulan kebijakan (menjadi undang-undang) (Wulandari,2012).

Dari fenomena yang disebutkan diatas bukan berarti semua perusahaan yang terkoneksi politik pasti aman. Sebagai contohsalah satu perusahaan

terkoneksi politik dinyatakan pailit karena tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo adalah PT. Bali Turtle Island Development, perusahaan milik Bambang Trihatmojo (Putra dari Mantan Presiden Soeharto). Salah satu direktur yaitu Sriyanto Muntasram merupakan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Panglima Daerah Militer III Siliwangi (2002-2005). PT BTID berhutang pada Penta Ocean Construction, Co., Ltd atas pengerjaan pengerukan dan reklamasi zona 11 di Pulau Serangan, Bali dengan perjanjian pada tanggal 24 November 1995. Total hutang yang harus dibayar PT BTID pada saat itu sebesar Rp 1.370.316.886,08. Jangka waktu pembayaran hutang tersebut dua belas tahun, namun hutang tersebut tidak dibayar sampai tanggal jatuh tempo (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Fenomena lain yang ditemukan di Indonesia adalah tentang kepemilikan perusahaan yang masih didominasi oleh keluarga. Perusahaan di Amerika dan Eropa umumnya dimiliki oleh berbagai pihak, sementara perusahaan di Asia, khususnya Indonesia umumnya dimiliki oleh keluarga. Perusahaan keluarga pada umumnya memiliki grup perusahaan yang terdiri dari beberapa perusahaan, baik yang tercatat maupun yang tidak. Contohnya, Indofood Sukses Makmur dan Indomobil, atau grup Bakrie yang memiliki bisnis di bidang sumber daya (Bumi Plc, PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk), media (PT. Visi Media Asia Tbk), telekomunikasi (PT. Bakrie Telecom Tbk), dan lainnya.

Kepemilikan terpusat yang dikuasai oleh satu keluarga merupakan hal yang menjadi karakteristik dunia bisnis di Indonesia. Sebagian besar perusahaan-perusahaan di Indonesia dikendalikan oleh pendirinya ataupun keluarga dan

keturunannya dan ataupun pernikahan antar perusahaan. Berdasarkan survey yang dilakukan The Jakarta Consulting Group tahun 2011 lalu, sekitar 80% perusahaan besar yang ada di Indonesia merupakan milik keluarga (*family bussiness*). Berdasarkan hasil *survey* tersebut, dapat dikatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki peranan besar dalam perekonomian Indonesia.

*Country assessment* yang dilakukan oleh *Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC)* pada tahun 2010 menemukan bahwa terdapat lima kategori kepemilikan yang biasa dijumpai di Indonesia, yakni kepemilikan oleh keluarga, kepemilikan oleh negara (BUMN), bank, kepemilikan asing, dan kepemilikan secara independen bukan bagian dari grup.

Perusahaan yang dijalankan atas bisnis keluarga tidak luput dari berbagai permasalahan. Diantaranya ada ketidakpercayaan antar sesama anggota keluarga, konflik dalam kepemimpinan, perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, pewaris perusahaan, dan sebagainya. Akibatnya, tidak sedikit bisnis keluarga mengalami kemunduran bahkan terpaksa tutup akibat konflik yang berkepanjangan di internal keluarga.

Beberapa penelitian mengenai *political connection* di Indonesia antara lain oleh Purwoto (2011) dalam Wulandari (2014) yang meneliti pengaruh koneksi politik, kepemilikan pemerintah, dan keburaman laporan keuangan terhadap kesinkronan dan risiko *crash* harga saham. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik, kepemilikan mayoritas pemerintah, maupun keburaman laporan keuangan meningkatkan kesinkronan harga saham. Wijantini (2007) meneliti hubungan antara koneksi politik dan biaya tidak langsung dari

*financial distress*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan adanya koneksi politik dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami tekanan keuangan. Masih sedikitnya penelitian di Indonesia mengenai pengaruh politik terhadap kinerja perusahaan, dan belum adanya penelitian yang mengaitkan kepemilikan keluarga dalam perusahaan dengan hubungan politik dan kinerja perusahaan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti akan mencoba untuk menemukan pengaruh hubungan politik pada perusahaan keluarga terhadap kinerja perusahaan yang akan dilakukan pada perusahaan-perusahaan keluarga yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah variabel kepemilikan keluarga dapat mempengaruhi kaitan antara hubungan politik dengan kinerja perusahaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah *political connection* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat :

1. Bagi investor dan calon investor

Bagi para investor dan calon investor, penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan referensi untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi. Apakah nantinya investor akan cenderung melakukan investasi pada perusahaan yang terkoneksi politik atau pada perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

2. Bagi akademisi dan peneliti berikutnya

Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian tentang kinerja perusahaan. Hasil penelitian dapat juga digunakan sebagai referensi dan acuan untuk melakukan penelitian berikutnya terutama pada penelitian yang terkait dengan membandingkan, mengamati, ataupun menganalisis ulang pengaruh dari suatu hubungan politik dengan pemerintah pada perusahaan keluarga terhadap kinerja perusahaan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan menjadi lima bab sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II :LANDASAN TEORI, bab ini berisi teori dan konsep dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi hipotesis penelitian.
3. BAB III :METODE PENELITIAN, bab ini berisi jenis penelitian, ukuran populasi dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, variabel yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.
4. BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.
5. BAB V :PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.